

DAMPAK INFLASI, PERTUMBUHAN JUMLAH PEKERJA, DAN PERTUMBUHAN PDB PER KAPITA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

Writer:
Norman Duma Sitinjak

Correspondence:
Norma1274@yahoo.com

Institution:
Universitas Merdeka
Malang

EKSIS
Vol XI No 2, 2016

ISSN:
1907-7513

<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>

abstract

Taxes highly reliable state of Indonesia as a source of revenue. Government should be able to manage its financial resources well. The way to do that is by paying attention to inflation, growth in the number of workers, and GDP Per Capita. Thirdly it is if less addressed, it can have an enormous impact on tax revenue. This study found that GDP positive effect on tax revenue.

Keywords: *Inflation, Growth Total Worker, GDP per capita, and the tax revenue*

abstrak

Pajak sangat diandalkan negara Indonesia sebagai sumber penerimaan. Untuk itu Pemerintah harus dapat mengelola sumber keuangannya dengan baik. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan jumlah pekerja, dan PDB Per Kapita. Ketiga hal tersebut jika kurang diperhatikan maka dapat berdampak sangat besar terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini ditemukan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: **Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, PDB Perkapita, dan Penerimaan pajak**

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Negara Republik Indonesia memerlukan dana yang besar. Penyumbang terbesar terhadap penerimaan negara adalah berasal dari pajak yang rata-rata pertahunnya sebesar 71%. Jika penerimaan pajak terganggu hal tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas pemerintah. Agar penerimaan pajak tidak terganggu maka harus dilakukan antisipasi terhadap hal-hal yang mempengaruhi penerimaan pajak. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati juga berlaku didalam pengelolaan keuangan negara.

Secara garis besar, hal yang mempengaruhi penerimaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mikro atau yang berhubungan langsung terhadap penerimaan pajak telah banyak dibahas. Misalnya tentang kepatuhan pajak, perlawanan pajak. Dari sisi makro tidak sebanyak dari sisi mikro, pertimbangannya adalah sisi makro tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi patut diketahui bahwa sisi makro akan memberikan dampak yang sangat besar. Sisi makro tersebut diantaranya adalah inflasi, pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan PDB per kapita.

Negara Indonesia tidak pernah lepas dari masalah inflasi. Inflasi seakan-akan menjadi momok bagi masyarakat Indonesia. Jika inflasi terjadi maka secara umum penjualan produk dan jasa akan semakin kecil. Jika penjualan produk dan jasa menurun maka dampak negatif yang dihasilkan sangat besar dan sifatnya berantai. Dimulai dari berkurangnya keuntungan perusahaan, penutupan perusahaan, bertambahnya pengangguran hingga terganggunya penerimaan pajak. Jika kondisi seperti ini telah terjadi maka

akan sangat sulit bagi suatu negara untuk melakukan perbaikan. Diperlukan upaya besar untuk menghentikan dan memperbaikinya.

Pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia diikuti dengan baik oleh pertumbuhan jumlah yang bekerja. Semakin banyak jumlah yang bekerja diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk dan jasa. Jika hal tersebut terjadi maka keuntungan perusahaan akan meningkat, jumlah perusahaan akan bertambah, pengangguran akan berkurang hingga penerimaan pajak akan meningkat.

Perekonomian suatu negara akan berdampak terhadap penerimaan pajak negara tersebut. Untuk mengukur kadar baik atau buruknya perekonomian suatu negara maka Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan alat ukur yang tepat. Sehingga harapannya adalah semakin tinggi PDB perkapita maka semakin tinggi juga penerimaan pajak negara tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, artikel ini menitikberatkan pada inflasi, pertumbuhan jumlah pekerja, dan pertumbuhan PDB per kapita terhadap penerimaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan yang diangkat yaitu: bagaimanakah dampak inflasi, pertumbuhan jumlah pekerja dan pertumbuhan PDB terhadap penerimaan pajak pusat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Inflasi

Menurut BPS (2016) inflasi adalah kecenderungan naiknya secara terus menerus harga barang dan jasa yang mengakibatkan penurunan daya beli dari nilai uang. Kenaikan inflasi tanpa disertai naiknya penghasilan masyarakat secara umum akan berakibat menurunnya daya beli. Jika kondisi ini terjadi secara terus menerus

(jangka panjang) maka reaksi berantai yang bersifat negatif akan menurunkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat terjadi karena daya beli yang menurun dalam kurun waktu jangka panjang akan mengakibatkan turunnya kinerja perusahaan sehingga dapat berdampak terhadap rasionalisasi terhadap karyawan. Semakin banyak masyarakat yang daya belinya menurun maka dapat memberikan dampak negatif terhadap perekonomian negara. Reaksi berikutnya akan sampai ke penurunan penerimaan pajak pusat.

Pertumbuhan Jumlah Pekerja

Menurut BPS (2016) :

1. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.
2. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
3. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.
4. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
5. Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya.

Pertumbuhan jumlah bekerja berarti penambahan atau pengurangan jumlah yang bekerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

PDB Per Kapita

PDB per Kapita adalah nilai pasar dari barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada suatu periode tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduknya (Mankiw, 2006). PDB merupakan suatu indikator untuk menentukan apakah perekonomian negara tersebut dalam kondisi yang baik atau buruk. Jika PDB per kapita mengalami kenaikan maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut dalam kondisi baik. Jika PDB mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga akan naik.

C. METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Variabel *Independent* (bebas) adalah variabel yang tidak terpengaruh oleh variabel lain, bahkan dapat mempengaruhi variabel lain (terikat). Yang dimaksud dalam variabel ini adalah: inflasi (X_1), pertumbuhan jumlah pekerja (X_2), dan pertumbuhan PDB per Kapita (X_3)
2. Variabel *Dependent* (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau tergantung oleh variabel lain. Yang dimaksud dalam variabel ini adalah Penerimaan Pajak (Y)

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua data tentang inflasi, pertumbuhan jumlah pekerja, pertumbuhan PDB per kapita dan penerimaan pajak. Sampel yang diambil adalah sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dengan dasar pemikiran bahwa sejak tahun 2000 Negara Indonesia baru saja melewati badai krisis moneter. Sehingga situasi

perekonomian Indonesia cenderung stabil terutama jika dibandingkan dengan sekitar tahun 1998.

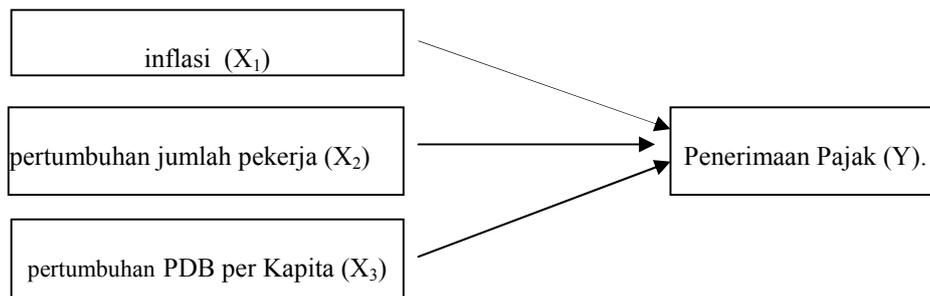
Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan agar mengetahui apakah hasil analisis regresi linear berganda yang dipergunakan dalam melakukan analisis bebas dari penyimpangan asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Analisis Linear Berganda

Analisis Linear Berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan variabel inflasi (X_1), pertumbuhan jumlah pekerja (X_2), dan pertumbuhan PDB per Kapita (X_3) terhadap Penerimaan Pajak (Y). Berikut kerangka konsep penelitiannya:



Gambar 1: Kerangka Konsep penelitian

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik: Multikolinearitas

Dari hasil olah data menggunakan SPSS, untuk uji multikolinearitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1: Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.552	.593		
Inf	-2.042	.068	.939	1.065
PJP	-1.356	.205	.829	1.206
PPdP	3.109	.011	.879	1.138

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Nilai VIF nya tidak ada yang lebih besar dari 5 (lima) sehingga model di atas telah terbebas dari adanya multikolinearitas

Uji Asumsi Klasik: Autokorelasi

Dari hasil olah data menggunakan SPSS, untuk uji autokorelasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2: Model Summary^b :

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760	.577	.450	231010.56533	.981

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Dengan jumlah variabel independen ($K=3$) dan banyaknya data ($n=13$) dengan level of significance 0,05% DW tabel adalah :

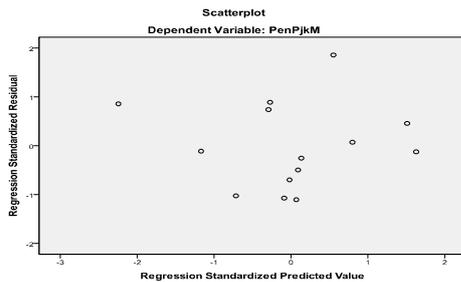
dl (batas bawah) = 0,715 4-dl = 3,285
 du (batas atas) = 1,816 4-du = 2,184

Nilai DW sebesar 0,981 berada pada antara dl dan du sehingga dapat disimpulkan model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik:

Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi kesamaan residual. Dari hasil olah data menggunakan SPSS, untuk uji heterokedastisitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

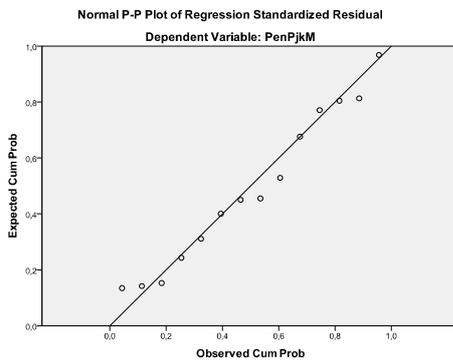


Gambar 2: Scatterplot

Dari gambar di atas terlihat bahwa sebaran titik tidak membentuk suatu pola/alur tertentu, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan pendekatan Normal P-P Plot. Hasilnya tampak pada gambar berikut:



Gambar 3: Normal P-P Plot

Pada gambar Normal P-P Plot di atas sebaran titik relatif mendekati garis lurus sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal.

Uji Kelayakan Model

Uji Keterandalan Model (Uji F)

Uji Keterandalan Model (Uji F) berguna untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji F dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: ANOVA^b

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.28E+11	3	2.43E+11	4.546	,029 ^a
Residual	5.34E+11	10	5.34E+10		
Total	1.26E+12	13			

a. Predictors: (Constant), PDBpKapita, Inf, BekerjaJtn

b. Dependent Variable: PenPjkM

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Nilai *prob. F* hitung (*sig.*) pada tabel di atas nilainya 0,029 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Inflasi (Inf), Pertumbuhan Jumlah Pekerja (PJP), dan Pertumbuhan PDB Per Kapita (PPdP) terhadap Penerimaan Pajak (PPk).

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah parameter yang diduga untuk mengestimasi model regresi linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Coefficients^a:

Coefficients ^a					
Model		t	Sig.	Collinearity Statistics	
				Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,552	,593		
	Inf	-2,042	,068	,939	1,065
	PJP	-1,356	,205	,829	1,206
	PPdP	3,109	,011	,879	1,138

Sumber: Data Primer diolah, 2015

Nilai *prob. t* hitung dari variabel bebas pada tabel Coefficients^a di atas yang lebih kecil dari alpha 0,05 hanya pada variabel PPdP, sehingga variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya hanya variabel PPdP.

Koefisien Determinasi

Tabel 5: Model Summary^b

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,760 ^a	0.577	0.45	231010.6

a. Predictors: (Constant), PPdP, Inf, PJP

b. Dependent Variable: PPK

Berdasarkan tabel di atas nilai diketahui nilai R-Square besarnya 0,577 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel Inf dan PJP, dan PPdP terhadap variabel PPK sebesar 57,7%.

Pembahasan

1. Hipotesis 1 ditolak karena nilai t sebesar -2,042 dengan signifikansi 0,068. Hal ini berarti bahwa Inf tidak memiliki pengaruh negatif terhadap PPK. Kondisi ini dapat terjadi karena penyebab inflasi di Indonesia juga disebabkan oleh adanya kenaikan gaji PNS dan Hari Raya. Dimana kedua penyebab tersebut menimbulkan permintaan barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa mengalami kenaikan. Selanjutnya, setelah harga barang dan jasa mengalami kenaikan akan tetapi permintaannya tetap naik sehingga produk dan jasa yang dihasilkan dapat terus naik. Dampak selanjutnya adalah Penerimaan pajak tidak terganggu. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Crane dan Nourzad (1986) bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap rata-rata penerimaan pajak.
2. Hipotesis 2 ditolak karena nilai t sebesar -1,356 dengan signifikansi 0,205. Hal ini berarti bahwa PJP tidak memiliki pengaruh positif terhadap PPK. Hal ini dapat terjadi karena walaupun jumlah tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di dalam negeri terus mengalami kenaikan akan tetapi Pemerintah Pusat terus menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP sejak tahun 2000 sampai dengan 2013 telah mengalami kenaikan sebanyak lima (5) kali. Peraturan yang melandasinya dimulai dari: (1) UU No. 17 Tahun 2000, (2) PMK No: 564/PMK.03/2004, (3) PMK No: 137PMK.03/2005, (4) UU No. 36 Tahun 2008, dan (5) PMK No:

162/PMK.011/2012. Kenaikan PTKP tersebut berdampak terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang secara rata-rata tidak mengalami kenaikan walaupun penghasilan bruto karyawan terus naik. Berbeda dengan hasil penelitian Yuksel, Orhan, dan Öztunç (2013) bahwa pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang bekerja berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

3. Hipotesis 3 diterima karena nilai t sebesar 3,109 dengan signifikansi 0,011. Hal ini berarti bahwa PPdP memiliki pengaruh positif terhadap PPK. Hal ini dapat terjadi karena semakin tingginya PDB maka semakin tinggi pula perekonomian Indonesia. Dampak selanjutnya adalah penerimaan pajak juga dapat semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian Edeme, Nkalu, dan Azu (2016) bahwa pertumbuhan PDB diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak.

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pusat. Yang artinya adalah semakin tinggi PDB maka penerimaan pajak semakin tinggi. Selain itu, kenaikan tingkat inflasi di Indonesia tidak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak karena kenaikan harga barang dan jasa juga disebabkan naiknya penghasilan masyarakat Indonesia secara umum dan permintaan. Sehingga walaupun harga barang dan jasa naik akan tetapi permintaan tidak turun.

Dari simpulan tersebut diatas, maka disarankan kepada pemerintah pusat untuk mengandalkan Wajib Pajak Badan sebagai sumber penerimaan pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) tetap dijaga daya belinya

agar permintaan barang dan jasa tidak turun.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2016. Konsep Inflasi. Diakses melalui <http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/3> pada tanggal 21 November 2016.
- BPS. 2016. Konsep/Penjelasan Teknis Bekerja. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6> pada tanggal 21 November 2016
- Crane, Steven E. dan Nourzad, Farrokh. 1986. Inflation and Tax Evasion: An Empirical Analysis. *The Review of Economics and Statistics* Vol. 68, No. 2.
- Edeme, R. Kojo. Nkalu, C. Nelson. Azu, Benedict. 2016. Alternative Specification And Estimation Of Tax Revenue-Gross Domestic Product Relationship. *Asian Journal of Economic Modelling*. 4 (3)
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mankiw. 2006. *Macroeconomics*. Alih Bahasa Imam Nurmawan. Edisi Kesepuluh. Erlangga. Jakarta
- Yüksel, Harun. Orhan, Mehmet. dan Öztunç, Hakan. 2013. Tax Revenue and Main Macroeconomic Indicators in Turkey. *European Journal of Economic and Political Studies*, Vol. 6, No. 1.